

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia dengan bentuk pemerintahan republiknya tentu mempunyai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Indonesia memiliki fungsi yang telah dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud bahwa negara Indonesia wajib untuk melindungi bangsanya, harus memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan bangsa, serta ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban didunia. Fungsi itu tentunya dapat diwujudkan dengan cara menyelenggarakan pembangunan nasional berupa peningkatan layanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas publik melalui dana yang bersumber dari APBN atau APBD.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan suatu lembaga atau organisasi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Hal ini merupakan salah satu tujuan pembangunan

nasional untuk melayani masyarakat guna menunjang pembangunan perekonomian nasional dan berperan penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang dapat mengatur rincian dan mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Sebagaimana diketahui, pada pengadaan baik barang maupun jasa pemerintah dari tahun ke tahun semakin kompleks dan diperlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak menyimpang dari aturan pengadaan barang dan jasa serta menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.

Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021, Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah suatu kegiatan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan dana yang bersumber dari APBN/APBD yang prosesnya diawali oleh identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa tersebut melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, hingga pelaksanaan. Sehingga semua prosesnya harus diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengadaan barang/jasa ini tentunya mempunyai kontribusi dan peran besar untuk perekonomian negara Indonesia. Dalam hal kebijakan fiskal, kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bertujuan untuk mendorong dan

menggerakkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, memperbaiki kualitas daya asing, dan menumbuhkan kualitas ekonomi Indonesia. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sehat dan melenceng dari peraturan yang ada akan berpotensi terjadinya kerugian yang akan diterima baik oleh masyarakat dan pemerintah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ialah suatu lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas dalam menanggulangi bencana di daerah baik pada tingkat Provinsi atau pada tingkat Kabupaten/Kota yang berlandaskan pada kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibutuhkan berbagai macam penunjang dan fasilitas. Salah satu Pengadaan yang dilakukan adalah rekonstruksi jalan Pal VII – Trans 50 yang bertujuan untuk memperbaiki mobilisasi daerah setempat dan mencegah adanya longsor.

Pengadaan rekonstruksi jalan Pal VII – Trans 50 dilatar belakangi karena rusaknya jalannya dan membuat lalu lintas di desa tersebut terganggu bahkan mobilisasi masyarakat menjadi kacau. Akibat dari hal ini, warga desa terisolir dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya dan mobilisasi pendistribusian hasil pertanian yang menjadi sumber utama mata pencaharian warga disana terhenti. Karena kondisi dan alasan tersebut BPBD berinisiatif untuk memperbaiki jalan tersebut untuk memperbaiki mobilitas dan memitigasi terjadinya bencana yang lebih membahayakan dan memakan korban nyawa.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, akan dipaparkan tentang proses pengadaan barang /jasa pemerintah yang ada pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Rejang Lebong yaitu pengadaan rekonstruksi jalan Pal VII – Trans 50, dengan meninjau mekanisme pengadaan barang jasa yang terjadi apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, penulis ingin mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengadaan jasa lainnya tersebut apalagi saat masa pandemi. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “Tinjauan Atas Pengadaan Rekonstruksi Jalan Pal VII – Trans 50 Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pengadaan rekontruksi Jalan Pal VII – Trans 50 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa; dan
- 2) Apa saja kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan pengadaan rekonstruksi Jalan Pal VII – Trans 50 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong serta bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini ialah:

- 1) Mengetahui kesesuaian pengadaan rekonstruksi Jalan Pal VII – Trans 50 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa; dan

- 2) Mengetahui kendala dan permasalahan yang muncul selama proses pengadaan rekonstruksi Jalan Pal VII – Trans 50 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong serta mengetahui solusi terhadap permasalahan tersebut.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada karya tulis ini, penulis akan membahas mengenai tinjauan atas pengadaan rekonstruksi Jalan Pal VII- Trans 50 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong. Penulis akan memaparkan hal-hal terkait proses pengadaan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan. Tak hanya itu, penulis juga akan meninjau apa masalah yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rejang Lebong dalam melakukan pengadaan ini. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan atas karya tulis tugas akhir ini agar pembahasan dalam karya tulis ini dapat fokus pada suatu topik bahasan tertentu saja.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Dalam pembahasan pada karya tulis tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada penulis dan pembaca baik untuk masyarakat luas ataupun untuk kajian ilmiah yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu karya tulis ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis terkait pengadaan barang/jasa pemerintah serta memberikan pengalaman tersendiri bagi penulis mengenai tahap-tahap pengadaan barang/jasa dari tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **2) BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini dipaparkan teori penetapan tujuan, landasan hukum yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah, dan konsep dasar pengadaan barang/jasa pemerintah.

### **3) BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian berupa profil, tugas dan fungsi, visi dan misi serta struktur organisasi.

Pada bab ini juga dipaparkan mengenai tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan permasalahan yang dialami objek.

### **4) BAB IV SIMPULAN**

Pada bab ini dipaparkan mengenai simpulan dari tinjauan yang telah dilakukan. Simpulan didapat dari pembahasan pada karya tulis ini yang mana pembahasan tersebut merupakan data dan informasi yang sudah diolah.

Simpulan inilah yang nantinya menjawab rumusan masalah pada karya tulis ini dan sesuai dengan tujuan penulisan dan/atau penelitian yang ingin dicapai. Dari dua rumusan masalah yang ada, akan terjawab pada bab simpulan ini.